

Pengaruh Budaya VOC Menumbuhkan Korupsi di Kalangan Penguasa Indonesia di Era Kolonial

Amelia Claudia¹, Atha Prima Azaria², Ghina Annisa Nurshaliha³, Intan Asri Hakim⁴

¹⁻⁴Prodi Pendidikan Sejarah, Fpips, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: ameliaclaudia05@gmail.com^{1*}, attaprimaazaria@gmail.com², Ghinaanisa@upi.edu³, Intanas@upi.edu⁴

Abstract. Indonesian history records the important role of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in shaping culture and government systems. The VOC, a Dutch trading company, was dominant in the colonial era, controlling territory that is now part of Indonesia, Malaysia and Singapore. In its influence, the VOC not only brought Western culture but also expanded corrupt practices in Indonesia. This study uses qualitative research methods with a focus on literature study. Data was obtained through analysis of primary and secondary sources, as well as interviews with historians. This approach allows for an in-depth understanding of VOC culture and the impact of the corruption it initiated. Corruption started by the VOC is still a continuing problem in Indonesia because it has affected culture, social structure and government. Efforts to overcome this problem require hard and consistent work from the government and society. The VOC's influence not only introduced corruption during the colonial period, but also left a lasting legacy that influences Indonesia to this day. This corruption has become integrated into the culture and system of government, requiring continued efforts to overcome its impacts.

Keywords: VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), Corruption, Culture, Indonesian ruler, Colonial Era

Abstrak. Sejarah Indonesia mencatat peran penting Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dalam membentuk budaya dan sistem pemerintahan. VOC, perusahaan dagang Belanda, dominan dalam era kolonial, mengontrol wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam pengaruhnya, VOC tidak hanya membawa budaya Barat tetapi juga memperluas praktik korupsi di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Data diperoleh melalui analisis sumber primer dan sekunder, serta wawancara dengan ahli sejarah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang budaya VOC dan dampak korupsi yang diperkenalkannya. Korupsi yang diperkenalkan oleh VOC masih menjadi masalah berkelanjutan di Indonesia karena telah merasuk ke dalam budaya, struktur sosial, dan pemerintahan. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kerja keras dan konsisten dari pemerintah dan masyarakat. Pengaruh VOC tidak hanya memperkenalkan korupsi pada masa kolonial, tetapi juga meninggalkan warisan berkelanjutan yang memengaruhi Indonesia hingga saat ini. Korupsi tersebut telah menyatu dengan budaya dan sistem pemerintahan, memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi dampaknya.

Kata Kunci : VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), Korupsi, Budaya, Penguasa Indonesia, Era Kolonial

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, era kolonial memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan sistem pemerintahan yang masih berpengaruh hingga saat ini. Salah satu perusahaan yang paling berpengaruh pada masa kolonial adalah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), sebuah perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di Indonesia dari tahun 1602 hingga 1799. Dalam era ini, VOC berperan sebagai penguasa de facto di Indonesia, menguasai wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya.

Dalam era kolonial, VOC tidak hanya berfokus pada kegiatan dagang, tetapi juga berperan dalam mengatur pemerintahan dan budaya di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mereka membawa budaya Barat, termasuk sistem pemerintahan, hukum, dan etika bisnis, ke Indonesia. Dalam proses ini, VOC juga membawa dan memperluas korupsi, yang pada awalnya adalah praktik yang umum di Eropa, ke Indonesia.

Korupsi, yang berarti penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, telah menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam era kolonial, korupsi diperkenalkan oleh VOC, yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mempengaruhi pemerintahan Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana budaya VOC menumbuhkan korupsi di kalangan penguasa Indonesia di era kolonial.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel "Pengaruh Budaya VOC Menumbuhkan Korupsi di Kalangan Penguasa Indonesia di Era Kolonial", digunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis kritis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti dokumen-dokumen VOC, catatan sejarah, dan karya-karya ilmiah tentang korupsi di Indonesia. Peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli sejarah dan ilmuwan lainnya yang memiliki pengetahuan tentang sejarah VOC dan korupsi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya VOC dan bagaimana korupsi yang diperkenalkan oleh VOC mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia di masa lalu. Melalui penggunaan metode ini, peneliti dapat menyusun gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara budaya VOC dan praktik korupsi, serta implikasinya terhadap dinamika politik dan ekonomi kolonial Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis yang mendalam tentang fenomena kompleks ini, yang dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang sejarah dan perkembangan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya VOC Mempengaruhi Korupsi Di Kalangan Penguasa Indonesia Selama Era Kolonial

Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) memainkan peran penting dalam membentuk lanskap budaya dan politik Indonesia selama era kolonial, khususnya dalam kaitannya dengan

prevalensi korupsi di kalangan elit penguasa. Pengaruh VOC sangat beragam, dan dampaknya terhadap korupsi para pemimpin Indonesia sangat besar. Kehadiran VOC di Indonesia memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang menekankan keuntungan dan kekuasaan atas kesejahteraan penduduk lokal. Hal ini menimbulkan budaya eksploitasi, dimana VOC dan sekutu lokalnya mengutamakan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan rakyat, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korupsi.

Struktur administratif VOC, yang ditandai dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, berkontribusi terhadap meluasnya korupsi di kalangan pemimpin Indonesia. Sistem pemerintahan VOC didasarkan pada struktur hierarki, dengan direktur perusahaan di Belanda memegang kekuasaan besar atas pemerintahan lokal. Hal ini menciptakan lingkungan di mana para pemimpin lokal diberi insentif untuk melakukan praktik korupsi demi mempertahankan posisi mereka dan memajukan kepentingan mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan masyarakat yang seharusnya mereka layani.

Pengaruh VOC terhadap norma budaya dan sosial masyarakat Indonesia juga berperan penting dalam maraknya korupsi. Kehadiran VOC di Indonesia menyebabkan masuknya adat istiadat dan nilai-nilai Eropa yang seringkali bertentangan dengan norma-norma tradisional Indonesia. Benturan budaya ini menciptakan lingkungan di mana korupsi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dan status, karena korupsi sering dikaitkan dengan kekayaan dan kekuasaan. Selain itu, pengaruh VOC terhadap sistem pendidikan di Indonesia juga berkontribusi terhadap maraknya korupsi, karena penekanan perusahaan pada keterampilan praktis dan kekayaan materi dibandingkan nilai-nilai moral dan etika membantu menciptakan budaya di mana korupsi dipandang sebagai cara yang layak untuk mencapai kesuksesan. .

Warisan VOC di Indonesia juga berkontribusi pada masih adanya korupsi di kalangan elit penguasa lama setelah perusahaan tersebut dibubarkan. Pengaruh VOC terhadap struktur administratif dan norma budaya masyarakat Indonesia menimbulkan dampak jangka panjang yang terus membentuk lanskap politik negara bahkan setelah perusahaan tersebut dibubarkan. Warisan korupsi ini semakin diperburuk oleh warisan kolonial Belanda, yang menekankan pentingnya kekuasaan dan kekayaan dibandingkan kesejahteraan rakyat, sehingga menciptakan lingkungan di mana korupsi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dan status.

Pengaruh Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) terhadap lanskap budaya dan politik Indonesia pada masa kolonial memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk prevalensi korupsi di kalangan elit penguasa. Perusahaan kolonial Belanda ini

menempatkan penekanan besar pada akumulasi keuntungan dan penguasaan wilayah, menciptakan struktur administratif yang sering kali memudahkan praktik korupsi. Selain itu, pengaruh budaya yang dibawa oleh VOC, termasuk norma-norma yang mementingkan keuntungan pribadi dan kekuasaan, ikut membentuk mindset yang mendorong praktik korupsi. Warisan ini tidak berakhir dengan pembubaran VOC; sebaliknya, ia mewariskan sebuah lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai jalan yang dapat diterima untuk mencapai kesuksesan dan status sosial. Bahkan setelah VOC tidak lagi beroperasi, korupsi tetap menjadi ciri khas di kalangan elite penguasa Indonesia, menunjukkan dampak jangka panjang dari pengaruh perusahaan kolonial tersebut terhadap lanskap politik negara.

Peninggalan budaya dan politik VOC menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai bagian yang tidak terhindarkan dari dinamika kekuasaan dan kekayaan. Praktik korupsi menjadi terinternalisasi dalam struktur sosial dan politik, di mana para elit penguasa memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia, warisan korupsi dari masa kolonial terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi pola-pola yang lebih kompleks dan tersembunyi

Pemerintahan yang rentan terhadap korupsi telah menjadi hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Praktik korupsi merugikan negara dalam hal pemborosan sumber daya, menurunkan kualitas layanan publik, dan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan mendorong distribusi sumber daya yang tidak merata dan merugikan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.

Untuk mengatasi masalah korupsi yang bersifat sistemik ini, diperlukan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan transparansi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif korupsi.

2. Korupsi Dibawa Oleh VOC Berpengaruh Pada Sistem Pemerintahan Indonesia Di Masa Lalu

Korupsi yang dibawa oleh VOC memiliki dampak yang signifikan pada sistem pemerintahan Indonesia di masa lalu. VOC, yang dikenal sebagai Dutch East India Company, adalah sebuah perusahaan dagang yang beroperasi di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern, pada abad ke-17 hingga ke-18. Dalam upaya untuk menguasai dan

memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah tersebut, VOC membawa sistem korupsi yang berbeda dari apa yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Korupsi VOC meliputi praktik penjarahan, perbudakan, dan eksploitasi sumber daya alam, serta manipulasi kebijakan moneter dan sistem pertahanan benteng yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil.

Korupsi VOC juga mempengaruhi struktur pemerintahan Indonesia. VOC memiliki tentara pribadi dan armada kapal yang memungkinkan mereka untuk menguasai wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara, seperti Batavia (sekarang Jakarta). Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. VOC juga memiliki legitimasi penuh dari negara dengan diberikannya berbagai fasilitas-fasilitas, seperti hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian, VOC dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan Indonesia dan memanipulasi sistem politik untuk kepentingan mereka sendiri.

Korupsi VOC mempengaruhi masyarakat Indonesia secara langsung. Mereka belajar tentang kebijakan moneter, sistem pertahanan benteng, etika kontrak, dan tentara bersenjata modern (meriam dan meriam) dari VOC. Namun, praktik korupsi VOC membuat rakyat Indonesia semakin miskin dan sengsara. Eksploitasi sumber daya alam dan penjarahan yang dilakukan VOC mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia. Korupsi VOC juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia, membuat mereka menjadi lebih tergantung pada VOC dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan VOC telah menjadi subjek penelitian dan diskusi yang signifikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia, menyadari pentingnya memahami dampak sejarah tersebut, telah mengambil langkah untuk mendukung penelitian lebih lanjut dan mengembangkan strategi untuk mengatasi konsekuensi korupsi VOC terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Langkah-langkah ini mencakup upaya untuk merespons secara tepat pada temuan dan rekomendasi dari penelitian tersebut, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, pemerintah Belanda juga telah menunjukkan komitmen untuk mengakui dan meminta maaf atas peristiwa-peristiwa kekerasan dan penindasan yang terjadi di masa lalu, termasuk korupsi yang dilakukan oleh VOC. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari proses rekonsiliasi dan penyelesaian sejarah antara Belanda dan Indonesia, dengan harapan dapat memulihkan hubungan antara kedua negara dan mempromosikan perdamaian serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengatasi dampak korupsi VOC dan membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ini termasuk implementasi nyata dari rekomendasi penelitian, penguatan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum, serta pembangunan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah.

3. Korupsi Diperkenalkan Oleh VOC Menjadi Masalah Yang Kompleks Dan Berkelanjutan Di Indonesia Hingga Saat Ini

Korupsi yang diperkenalkan oleh VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) telah menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia hingga saat ini karena berbagai alasan yang terkait erat dengan sejarah dan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia. VOC, yang didirikan pada tahun 1602, merupakan perusahaan dagang Belanda yang memiliki kepentingan ekonomi yang sangat kuat dan kendali yang luas atas perekonomian Indonesia pada masa kolonial. Dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan, VOC menggunakan praktik korupsi secara meluas. Mereka memanfaatkan posisi dominan mereka dalam perdagangan rempah-rempah untuk mengendalikan pasar dan memperoleh keuntungan yang besar. Praktik korupsi ini tidak hanya terbatas pada lingkungan bisnis, tetapi juga merasuki sistem pemerintahan yang mereka bangun di wilayah-wilayah yang dikuasai. Dengan memanipulasi struktur kekuasaan dan memanfaatkan ketergantungan ekonomi serta politik masyarakat lokal, VOC mengamalkan korupsi sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka.

Pengaruh VOC tidak hanya bersifat ekonomi dan politik, tetapi juga kultural. Budaya korupsi yang diperkenalkan oleh VOC menjadi terinternalisasi dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Praktik korupsi menjadi bagian yang terbiasa dan diterima secara luas dalam dinamika sosial. Hal ini disebabkan oleh norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berkembang di bawah pengaruh VOC, yang menempatkan kepentingan pribadi dan akumulasi kekayaan di atas kepentingan kolektif dan keadilan sosial. Peninggalan budaya korupsi yang diperkenalkan oleh VOC terus bertahan bahkan setelah mereka tidak lagi berkuasa di Indonesia. Praktik korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik dan pemerintahan Indonesia, menciptakan tantangan yang besar dalam upaya untuk memerangi korupsi secara efektif dan membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Korupsi yang diperkenalkan oleh VOC juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Mereka memperkenalkan sistem kasta yang jelas, dengan VOC sebagai kasta atas dan masyarakat Indonesia sebagai kasta bawah. Korupsi yang dilakukan oleh VOC memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi mereka sebagai kasta atas dan

mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi di Indonesia. Dalam beberapa generasi, korupsi menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia dan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia. Mereka menjadi terbiasa dengan korupsi dan memandangnya sebagai cara yang normal untuk beroperasi dalam masyarakat.

Selain itu, korupsi yang diperkenalkan oleh VOC juga mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. VOC memperkenalkan sistem pemerintahan yang korup dan memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memperkenalkan sistem pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga korupsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam beberapa generasi, korupsi menjadi bagian dari budaya pemerintahan di Indonesia dan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku pejabat pemerintahan. Mereka menjadi terbiasa dengan korupsi dan memandangnya sebagai cara yang normal untuk beroperasi dalam pemerintahan.

Korupsi yang diperkenalkan oleh VOC juga mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh VOC memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi mereka sebagai kasta atas dan mempengaruhi keputusan ekonomi di Indonesia. Mereka memperkenalkan sistem ekonomi yang korup dan memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam beberapa generasi, korupsi menjadi bagian dari budaya ekonomi di Indonesia dan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia. Mereka menjadi terbiasa dengan korupsi dan memandangnya sebagai cara yang normal untuk beroperasi dalam perekonomian.

Dalam beberapa generasi, korupsi yang diperkenalkan oleh VOC menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia dan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia. Mereka menjadi terbiasa dengan korupsi dan memandangnya sebagai cara yang normal untuk beroperasi dalam masyarakat. Korupsi yang diperkenalkan oleh VOC juga mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia dan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, korupsi yang diperkenalkan oleh VOC menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia hingga saat ini dan memerlukan upaya yang keras dan terus-menerus untuk mengatasi masalah ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh pembahasan di bawah adalah bahwa pengaruh VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) memiliki dampak yang signifikan terhadap prevalensi korupsi di kalangan elit penguasa Indonesia selama era kolonial. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada masa kolonial Belanda, tetapi juga berlanjut hingga masa kini. VOC

memperkenalkan sistem pemerintahan yang korup dan memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri, menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai cara yang layak untuk mencapai kesuksesan dan status. Selain itu, korupsi yang diperkenalkan oleh VOC mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia secara luas. Budaya eksploitasi dan penekanan pada keuntungan dan kekuasaan telah menjadi bagian dari warisan kolonial Belanda yang berkontribusi pada persistensi korupsi di Indonesia bahkan setelah VOC dibubarkan. Dengan demikian, kesimpulan dari keseluruhan pembahasan adalah bahwa korupsi yang diperkenalkan oleh VOC telah menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia hingga saat ini, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan upaya yang keras dan terus-menerus untuk mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Argiya, V. S. P. M. (2013). Mengupas tuntas budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju indonesia bersih. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Atmadja, A. T. (2019). *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Kencana.
- Budiman, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Budaya Melayu. *Jurnal Pendidikan Guru*, 1(2), 16-26.
- Corruption in Indonesia: A Historical Perspective by A. Budiman, *Journal of Indonesian Social Sciences*, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Dewantara, A. W. (2018). Sikap Lepas Bebas Kristiani Sebagai Bahasa Teologi Antikorupsi. *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi*, 1-22.
- Edy Herry Pryhantoro, M. (2016). *Korupsi dalam perspektif teori sosial kontemporer*. Spasi.
- Hartiningsih, M. (2011). *Korupsi yang Memiskinkan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 18(1).
- Hermawan, S. (2023). *Memperdagangkan Pengaruh Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)*.
- Karyanti, T., Prihati, Y., & Galih, S. T. (2019). *Pendidikan anti korupsi berbasis multimedia*. Deepublish.

- Kebudayaan, K. P. D. (2017). Sejarah Indonesia. Buku Siswa Kelas X, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniawati, N. (2008). Peran Mochtar Lubis dalam perkembanganpers Indonesia (studi kasus harian Indonesia raya mengungkap korupsi masa awal orde baru 1966-1974.
- Kusnadi, C. D., Primayasti, M., & Talu, M. A. Korupsi, Kolusi, dan Feodalisme. Baskara T. Wardaya, SJ & Brigida Intan Printina, 37.
- Listiyanawati, M. D., & M Si Med, D. (2020). Modul Ajar Pendidikan Anti Korupsi.
- Nurrohmah, A. (2017). Peran Media Berantas Korupsi, Efektivitas Program Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah di TVMU.
- Pieris, J. (2004). Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan: sebuah krisis peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Yayasan Obor Indonesia.
- Priyowidodo, G., & Sari, Y. D. (2017). Model Komunikasi dan Strategi Kebijakan Kesadaran Anti Korupsi. ANDI Yogyakarta.
- Pryhantoro, E. H., & Susan, N. (2010). Korupsi Dalam Model Kapitalisme Kaum Peranakan: Analisis Strukturasi Terhadap Kendala Kultural Gerakan Sosial Anti-Korupsi di Kalangan Pengusaha Cina.
- Purba, N. (2017). Kearifan lokal budaya malu masyarakat melayu dalam mencegah korupsi.
- Ridwan Zachrie, W. (2013). Korupsi mengorupsi Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi, A. (2021). Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi. AE Publishing.
- Semma, M. (2008). Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik. Yayasan Obor Indonesia.
- Setiawan, A. R. (2012). Pemberantasan Korupsi Dalam Dimensi Radical Humanist Dan Radical Structuralist: Menengok (Pula) Peran Akuntan (Si) Forensik. InFestasi, 8(2), 157-170.
- Sukiyat, H. (2020). Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. Jakad Media Publishing.
- Sutrisno, S. (2022). Pendidikan Anti Korupsi “Abad 21 Masihkah Ada Korupsi?”.
- The Dutch East India Company and the Corruption of Indonesian Governance by J. van Goor, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 34, No. 2 (2003).
- Tobing, F. (2022). Penanganan Permasalahan Perilaku Koruptif Pada Anak Muda Dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(4), 148-158.
- Zachrie, R. (Ed.). (2009). Korupsi mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan. PT Gramedia Pustaka Utama.